

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan, nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan Pembiayaan Negara (APBN).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri yaitu berupa pajak. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah.

Salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan untuk membangun daerah dalam suatu Negara harus didasarkan pada perekonomian yang real dan berkesinambungan agar pembangunan yang di cita-citakan bangsa ini cepat tercapai, peran pajak Bumi dan Bangunan pada daerah sangat vital dan dapat mengembalikan uang tersebut ke daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985, kemudian UU ini di ubah dengan UU No. 12 Tahun 1998 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995, yang di dalamnya meliputi perkebunan, perhutanan, pertambangan, perkotaan, dan perdesaan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang penerimaannya di bagi-bagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan. Imbangan pembagiaan penerimaan PBB diatur dalam Pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui PP No. 16 Tahun 2000 Tanggal 10 Maret dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.041200 Tanggal 21 Maret 2000 Tentang Pembagiaan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu untuk Pemerintah Pusat sebesar 10% dan Pemerintah Daerah sebesar 90% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tersebut dimasukan dalam kelompok Penerimaan Bagi Hasil Pajak.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2008 pasal transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus terselenggara paling lambat Tanggal 31 Desember 2013. Hal ini merupakan desentralisasi fiskal yang menjadi bagian dari realisasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang merupakan bagian dari tuntutan reformasi 1998. Dalam transisi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di butuhkan kesiapan pembentukan dan implementasi regulasi, sebagai dasar mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan, guna terselenggaranya PengelolaanPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang efektifitas dan efisiensi.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah atau PERDA No. 2 Tahun 2013. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sistem self assesment system, yang mana wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor pajak terutang kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis.

Pada dasarnya setiap mekanisme Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah itu sama saja, hanya saja jangka waktu pengalihan dan kesiapan dari masing-masing daerah itu yang berbeda, seperti Kota Surabaya, Kota Surabaya melakukan pengalihan pada tahun 2011 dan menjadi Kota pertama yg melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, karena mereka mempunyai persiapan yang matang dari segala sisi, sedangkan kabupaten Bengkalis termasuk daerah yg lambat dalam melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan karena ada beberapa hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang paham tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini dan sarana prasarana yg belum memadai.

Sehubungan dengan adanya Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis maka terdapat beberapa masalah yang terjadi yaitu: Peralatan yang ada belum memadai atau belum memenuhi standar, Pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tidak mencukupi dan untuk membeli Peralatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Sumber daya manusia yang tidak menguasai Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kurangnya acuan atau pedoman Tentang Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui“**MEKANISME PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI PEMERINTAH PUSAT**

## **KE PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGAMBIL STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS”.**

### **I.2. Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis diatas. Dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut:

**Bagaimana Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunandari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis?**

### **I.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tentang mekanismePengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkalis.

#### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

- a) Untuk menambah pengetahuan tentang Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b) Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat untuk dijadikan pengetahuan mengenai mekanisme Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- c) Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

### **1.4. Metode Penulisan**

#### **1.4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tanggal 1 Februari 2014 dan direncanakan akan pada Tanggal 15 Maret 2014.

#### **1.4.3. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan. Dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi yaitu pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang terdiri dari lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan laporan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DISPENDA**

### **KABUPATEN BENGKALIS**

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, susunan organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## **BAB III : TINJUAN TEORI & PRAKTEK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**